

Perajin Tempe Tahu Terima Subsidi

SALATIGA (KR) - Sebanyak 217 perajin tempe tahu di Kota Salatiga boleh dibilang bernapas lega. Pemkot Salatiga melalui Dinas Koperasi dan UKM mensubsidi harga kedelai sebesar Rp 2.000/kg. Subsidi ini merupakan aspirasi Ketua DPRD Salatiga Dance Ishak Palit setelah dirinya turun ke lapangan melihat kondisi para perajin tempe tahu. Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit mengungkapkan dana subsidi kedelai ini dari APBD Perubahan Salatiga 2022. "Bantuan subsidi kedelai ini berasal dari aspirasi saya sebagai Ketua DPRD Salatiga untuk meringankan perajin tahu tempe di Salatiga. Dimana harga kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu naik semua," ungkap Dance Ishak Palit, Senin (21/11).

Dance mengatakan, jumlah alokasi anggaran di APBD Perubahan 2022 memang tidak besar, Rp 200 juta untuk 217 perajin di Salatiga. "Semoga bisa meringankan beban karena tahu tempe adalah makanan tradisional di Indonesia," katanya. Diungkapkan, pemberian subsidi harga kedelai ini bekerja sama dengan Primkopti Handayani Salatiga. (Sus)-f

Komisi VII Dorong Pemerintah Selesaikan RUU EBT

PURWOREJO (KR) - Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Energi Baru Terbarukan (EBT). Karding optimis UU yang akan mengatur tentang energi alternatif itu akan selesai sebelum masa kerjanya berakhir. Hal tersebut diungkapkan Abdul Kadir Karding di sela pelatihan pembuatan pakan ternak dan pengolahan limbah yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Balai pertemuan Pondok Pesantren Al Faham Baledono Purworejo, Minggu (20/11).

"Kami berharap selesai Desember 2022 tapi sepertinya tidak bisa, tapi kami optimis akan selesai di periode ini," tutur Karding. Menurutnya, RUU EBT merupakan hasil inisiatif Komisi VII DPR RI. Saat ini, draf RUU tersebut sudah dikirimkan DPR kepada pemerintah.

Proses selanjutnya, lanjut Karding, adalah pembahasan bersama menteri terkait untuk mengerucutkan draf hingga menjadi UU. "Saya berharap Presiden Jokowi segera menugaskan menteri terkait dan mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk dibahas bersama DPR," ujarnya. RUU EBT berisi tentang penyiapan energi terbarukan di Indonesia. RUU itu, katanya, berisi pedoman tentang apa yang harus dikerjakan, larangan, serta target penyiapan EBT di Indonesia. RUU termasuk mengatur upaya menekan emisi karbon dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. RUU juga mengatur tentang kesiapan dunia usaha dalam mengurangi emisi karbon.

"Dirumuskan caranya, sumber EBT bagaimana infrastrukturnya. Contohnya, mobil listrik, konversinya kelak seperti apa," ungkapnya. Dikatakan, Presiden Jokowi memiliki komitmen yang tinggi dalam mengurangi emisi karbon dan memanfaatkan EBT sebagai sumber energi bangsa. Terlihat dalam G20, di mana Indonesia mendukung pengurangan emisi karbon besar-besaran, targetnya tercapai pada tahun 2030. (Jas)-f

Disdik Salatiga Gelar FGD Merdeka Belajar

SALATIGA (KR) - Dinas Pendidikan (Disdik) Salatiga menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Mini Theater Gedung DPRD Salatiga, Senin (21/11). Kepala Dinas Pendidikan Salatiga, Nunuk Dartini mengatakan kegiatan FGD ini sebagai sarana menyampaikan kebijakan program merdeka belajar merdeka. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari semua lini termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mewujudkan program sekolah merdeka belajar. "FGD untuk mengetahui perkembangan implementasi program merdeka belajar khususnya di Kota Salatiga," kata Nunuk Dartini.

Kegiatan FGD kali ini diikuti Dewan Pendidikan Kota Salatiga, OPD terkait, camat, Kepala Sekolah Penggerak angkatan 2 dan perwakilan angkatan 3, Komunitas Belajar, Komunitas Praktisi, Fasilitator PSP, Co Captain belajar id, dan pengawas TK, SD, dan SMP. Selain Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Nunuk Dartini, hadir sebagai pemateri, Kepala Balai Besar Panjin Mutu Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, dan Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jateng Nico Arif Mardika.

Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit mengungkapkan pentingnya pemangku kepentingan membuka pikiran terkait program merdeka belajar. Sekarang masa transisi lebih para pengajar, kepala sekolah, termasuk DPRD. Menurutnya, saat ini kita semua masih berpikir romantisme dulu, seharusnya yang merdeka belajar dari guru dulu, tapi kondisi sangat cepat berubah sehingga siswa lebih dulu mengetahui informasi daripada guru. "Sumber belajar bukan satu-satunya dari guru, anak bisa lebih tahu dari sumber manapun, ini yang harus kita perhatikan dalam menghadapi merdeka belajar," tandas Dance Ishak Palit. (Sus)-f

Sinergitas Bersama Kemenhub Demi Keselamatan Perjalanan KA



PURWOREJO (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo membangun sinergitas bersama Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api (KA) dan masyarakat pengguna jalan. Upaya bersama itu dilakukan dengan menjaga sejumlah perlintasan sebidang yang tidak dijaga petugas Kemenhub.

Perlintasan sebidang yang dijaga petugas resmi Pemkab Purworejo ada di Desa Babangsari dan Krendetan Kecamatan Bagelen, Tegal

kuning Banyuwirip, Bayem Kutoarjo, dan Andong Butuh. "Lima perlintasan itu termasuk jalur yang sibuk, lalu lintasnya padat sehingga rawan kecelakaan," kata Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH, kepada KR, Selasa (22/10).

Selain itu, ada satu *underpass* di Desa Besole Kecamatan Bayan yang juga dijaga petugas. Enam titik perlintasan itu dijaga secara bergantian selama 24 jam oleh 24 petugas yang direkrut Pemkab. Menurutnya, Pemkab memberikan perhatian yang cukup kepada petugas penjaga perlintasan sebidang yang direkrut. Mereka menerima hak sesuai ketentuan berlaku serta tali asih pada saat momen tertentu. "Mereka selama ini berjuang menjamin keselamatan warga pengguna jalan, serta menjaga keselamatan perjalanan kereta api," tegasnya.

Kendati demikian, masih ada perlintasan sebidang yang belum dijaga petugas. Perlintasan itu adalah akses

ilegal, namun ramai dilintasi pengguna jalan. Pemkab bersinergi dengan PT KAI untuk menertibkan perlintasan tidak resmi itu. "Tidak hanya itu, pemerintah juga mengimbau, warga untuk selalu berhati-hati saat akan melintasi rel yang tidak ada palang pintunya. Berhenti sejenak, pastikan dari arah kanan dan kiri tidak kereta yang akan melintas," tuturnya.

Sinergitas itu membuat Kabupaten Purworejo meraih penghargaan Railway Safety Award 2022 dari Kemenhub RI. Wabup Yuli Hastuti SH menerima penghargaan dari Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kemenhub Edi Nursalam, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Hery Raharjo, di Padang Sumatera Barat, belum lama ini.

Terpisah, Edi Nursalam mengatakan, Kabupaten Purworejo mendapat penghargaan sebagai daerah yang berperan aktif dalam upaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Penghargaan itu, di-

berikan kepada *stake holder* yang memiliki nilai terbaik berdasarkan atas penilaian para pakar dan ahli transportasi. Kemenhub RI menilai sejumlah daerah atas peranannya dalam mendukung peningkatan keselamatan, khususnya melalui penataan dan pengelolaan perlintasan sebidang. "Sudah saatnya kita memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kepala daerah yang telah mendukung program keselamatan perkotaan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Purworejo

Hery Raharjo menambahkan, upaya menjaga keselamatan perjalanan KA dan masyarakat tidak hanya dilakukan di perlintasan yang dijaga oleh petugas. Pemkab, lanjutnya, juga berkoordinasi dengan desa-desa yang dilintasi rel KA untuk ikut membantu menjaga keselamatan. "Khususnya dilakukan pada momentum tertentu seperti Idul Fitri, di mana lalu lintas sangat sibuk. Desa yang dilintasi jalur KA akan menerjunkan petugas linmas untuk menjaga perlintasan sebidang di wilayah mereka," paparnya. (Jas)-f



KR-Dokumen
Wabup Purworejo Yuli Hastuti SH menerima penghargaan dari Kemenhub RI.

Pemkot Salatiga Bantu Korban Gempa

SALATIGA (KR) - Pemkot Salatiga memberi bantuan kepada korban bencana gempa bumi di Cianjur tahap awal sebesar Rp 50 juta. Bantuan ini langsung dikirimkan kepada korban melalui BPBD Kabupaten Cianjur agar segera bisa dimanfaatkan.

"Pada tahap awal ini, kami langsung memberikan bantuan Rp 50 juta untuk diberikan kepada Kabupaten Cianjur. Semoga ada manfaatnya. Semoga dari Salatiga bisa meringankan beban yang ada, bisa dibangun kembali. Kita akan terus membantu," ujar Pj Walikota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi usai Apel Bersama di

halaman Kantor Walikota Salatiga, Selasa (22/11).

Respons cepat dan kepedulian untuk membantu dilakukan Pemerintahan Kota Salatiga terkait adanya bencana gempa magnitudo 5,6 SR yang mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Puluhan orang meninggal dan terluka dari peristiwa tersebut.

Gempa yang terjadi pukul 13.21 WIB pada Senin (21/11) telah memporakporandakan bangunan rumah dan lainnya.

Sementara itu, para ASN dan pejabat di Pemkot Salatiga juga melaksanakan salat gaib di Pendopo Pakuwon Salatiga untuk mendoakan para korban gempa di Cianjur tersebut, Selasa (22/11).

Sinoeng juga memerintahkan BPBD Salatiga terus melakukan komunikasi dengan BPBD Kabupaten Cianjur untuk mengetahui perkembangannya.

Menurut Laporan yang didapatkan, Sinoeng mencatat sampai

jam 24.00 dini hari tadi, korban sudah mencapai angka 162 korban dan didominasi oleh anak-anak. Sementara untuk korban luka adalah mencapai 1.300, dan kerusakan rumah.

"Saya mendorong personil dari BPBD untuk segera berkomunikasi dengan BPBD dan Basarnas di Cianjur. Kita mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan. Termasuk pembersihan reruntuhan bangunan, kalau dibutuhkan tenaga kita akan diberangkatkan ke Cianjur. Siapkan segera logistik dan sarana lainnya, termasuk relawan," katanya. (Sus)-f

Warga Serbu Vaksinasi di Rail Clinic Delanggu

KLATEN (KR) - Ratusan warga antusias melakukan vaksinasi Covid-19 di rail clinic, dalam bakti sosial yang digelar PT Kereta Api Indonesia (Perseero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta, di Stasiun Delanggu, Klaten, Senin (21/11). Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Franoto Wibowo mengemukakan, da-

lam kegiatan ini juga dilaksanakan penyuluhan kesehatan gigi oleh Tim Kesehatan KAI Daop 6 Yogyakarta, serta sosialisasi keselamatan dan pengenalan profil KAI bagi siswa/i SDN Gatak 1 Delanggu.

Sosialisasi yang dilakukan di dalam rail library tersebut, bertujuan

mengedukasi anak usia dini, agar memahami keselamatan di perlintasan sebidang, keselamatan di jalur KA, keselamatan perjalanan KA, serta memperkenalkan job profil di PT KAI. Sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat juga diberikan paket sembako untuk 500 peserta bakti

sosial layanan vaksinasi. Paket sembako sumbangan dari berbagai donatur yang dikelola oleh YPP tersebut, diharapkan dapat membantu meringankan kesulitan akibat masih dalam masa pandemi Covid-19.

"Kami menyiapkan 500 dosis vaksin yang dibantu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Kalau biasanya kita datang ke rail clinic itu untuk pengobatan gratis, pelayanan kesehatan masyarakat dengan menggunakan sarana yang ada di rail clinic, sekarang ini kita gunakan untuk kegiatan vaksinasi Covid 19. Sarana rail clinic ini dirangkaikan dengan rail library/perpustakaan. Didalamnya ada perpustakaan digital ataupun buku-buku untuk memotivasi anak-anak sekolah agar berbudaya literasi," kata Franoto Wibowo.

Franoto menjelaskan, rail clinic dan rail library tersebut dioperasikan un-

tuk kegiatan bakti sosial di Pulau Jawa secara bergantian, di daerah-daerah yang membutuhkan. Setelah di Delanggu, direncanakan pada bulan Desember akan dilakukan bakti sosial di Solo.

"Layanan vaksinasi menggunakan rail clinic ini yang kedua, setelah di Stasiun Sentolo, dan rencana bulan depan di Solo," tambah Franoto.

Masyarakat cukup antusias untuk memanfaatkan kegiatan vaksinasi yang digelar di rail clinic tersebut. Franoto menilai, masyarakat telah memahami pentingnya vaksinasi Covid 19.

"Ini semata-mata untuk tercapainya herd immunity. Kemenhub melalui SE 84 tahun 2022, mensyaratkan penumpang kereta api dengan usia di atas 18 tahun harus sudah booster dan penumpang usia 6 sampai 17 tahun harus sudah vaksin dosis 2," jelas Franoto. (Sit)-f



KR-Sri Warsiti
Franoto menyaksikan warga yang sedang divaksin di dalam rail clinic.

Aspek Perpajakan Investasi Kripto di Indonesia

CRYPTOCURRENCY merupakan implementasi pertama dari teknologi Blockchain dan kemampuannya tidak terbatas pada sistem pembayaran. Program desentralisasi meliputi ekonomi, sains, pendidikan, seni, budaya, dan sebagainya. (Shovkhalov dan Idyrisov, 20-21). Cryptocurrency adalah uang terdesentralisasi. Mata uang digital ini didukung teknologi enkripsi sehingga tidak ada perantara dalam transaksi. Pembayaran Cryptocurrency melalui cara yang sama dari pengirim ke penerima.

Perangkat yang menjalankan jaringan terdesentralisasi didasarkan pada teknologi desentralisasi. Blockchain sendiri adalah jaringan komputer terdistribusi. Uang digital ini tidak dikeluarkan oleh otoritas keuangan pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat 'mencuri' uang tersebut. Singkatnya, Cryptocurrency adalah uang digital yang tidak dapat digunakan sebagai koin

atau mata uang di seluruh dunia. Dalam cryptocurrency, semuanya benar-benar terbuka. Namun, uang digital sangat mahal.

Setelah memahami cryptocurrency, perlu mengetahui metode atau fungsi transaksi yang dilakukan dengan mata uang digital. Untungnya, perdagangan valas fleksibel karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang dibutuhkan hanya telepon atau komputer dengan koneksi internet dan dapat mengirim atau menerima uang tanpa perantara. Meskipun di luar jam kerja, bahkan perdagangan valas dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Misalnya, ketika seseorang mengirim uang ke penerima. Kedua belah pihak akan diberitahu tentang jumlah transaksi. Itu ditandatangani oleh kunci pribadi sistem operasi. Produk yang ditentukan kemudian disimpan secara permanen. Tidak seorang pun dapat me-

ngubah, mencuri, atau memalsukan dokumen-dokumen ini.

Desain utama di balik keamanan cryptocurrency dan teknologi blockchain adalah teknologi terdesentralisasi yang menggunakan distribusi digital untuk mencatat transaksi yang transparan dan stabil antara dua pihak secara permanen, dapat diverifikasi, dan permanen. Ide dasar dari setiap transaksi adalah seluruh jaringan mencatat waktu saat ini, termasuk jumlah transaksi dan saldo aset. Misalnya, jika seseorang berhasil menyelesaikan transaksi dan penerima mengonfirmasinya, seluruh jaringan yang terhubung ke blockchain segera menerima informasi yang menjelaskan jumlah transaksi dan ditandatangani dengan nomor dan kunci. Disampaikan secara individual.

Dalam praktiknya, penggunaan aset kriptografi sebagai alat pembayaran masih dilarang, tetapi sebagai investasi mereka dapat di-

masuk sebagai produk yang dapat diperdagangkan di bursa masa depan. Undang-Undang No 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam pasal 1 Nomor 2, komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivat Syariah, dan/atau Kontrak Derivat Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pada pasal 4, komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivat syariah, dan/atau kontra derivatif lainnya hanya dapat

diperdagangkan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratan mendapat persetujuan dari Kepala Bappebti. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Aspek perpajakan
Jika dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PPN termasuk dalam kategori Barang Tidak Berwujud dan dalam Pasal 1 angka 6 PMK 48/PMK.03/2020 termasuk Barang Digital, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu kripto bukan mata uang tetapi merupakan barang berupa hak dan kepentingan lainnya yang berbentuk digital. Oleh karena itu, PPN memandang sebagai Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 PMK 68/PMK.03/2022, yang dimaksud Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. PPN dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa Aset Kripto oleh Penjual Aset Kripto, Jasa Kena Pajak berupa jasa penyediaan Sarana Elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan Aset Kripto oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), dan/atau Jasa Kena Pajak berupa jasa verifikasi transaksi Aset Kripto dan/atau jasa manajemen kelompok Penambang Aset Kripto.

*) Opera Agus Yudi Utomo
Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda.